

Model Komunikasi Reses Anggota DPRD dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Bangkalan

(Studi berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Anggota DPRD)

Holilah, Muchammad Ismail

Abstrak

Kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota dewan merupakan salah satu medium dalam melakukan komunikasi politik untuk menyerap aspirasi konstituen. Latar belakang pendidikan anggota dewan menjadi salah satu aspek penting yang ikut menentukan model komunikasi yang digunakan saat reses sehingga terwujud komunikasi yang efektif dan partisipatif. Studi ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbedaan model komunikasi yang digunakan anggota dewan yang berpendidikan sarjana dengan bukan sarjana di Kabupaten Bangkalan serta apakah ada kendala komunikasi yang melingkupi. Studi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi kasus. Informan berjumlah 10 orang terdiri dari anggota DPRD sarjana dan bukan sarjana, masyarakat, tokoh partai, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh perempuan. Dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil studi menunjukkan bahwa model komunikasi reses yang digunakan oleh anggota DPRD yang berpendidikan sarjana dan bukan sarjana tidak ada perbedaan yang signifikan. Model komunikasi cenderung dua arah pada waktu reses. Sedangkan kendala yang dihadapi ialah minimnya perempuan menyampaikan aspirasi pada saat reses, mayoritas aspirasi disampaikan oleh laki-laki.

Kata Kunci: Model Komunikasi, Daerah Pemilihan, Reses

Pendahuluan

Reses merupakan sarana komunikasi politik antara anggota Dewan dengan para konstituen di daerah pemilihannya. Komunikasi politik diwujudkan dalam format penyerapan aspirasi, menerima pengaduan dan gagasan yang berkembang

di daerah (Kurniasih & Rusfiana, 2021). Tidak bisa dipungkiri bahwa reses menjadi salah satu cara efektif untuk mengetahui kebutuhan masyarakat di daerah. Reses menjadi bentuk komunikasi timbal balik antara anggota DPRD dengan para konstituen, karena didalam reses, masyarakat akan diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk menyampaikan aspirasinya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai salah satu perwakilan dari partai politik untuk mengantarkan aspirasi rakyat, harus memperjuangkan semuanya yang menjadi hajat dari rakyatnya, dan pintar, cerdas dalam melihat, memandang peluang, dan arif dalam memutuskan suatu kebijakan. Dengan segala argumentasi, komunikasi yang dibentuk oleh anggota DPRD sebagai wakil rakyat, harus mengutamakan kepentingan rakyat dari pada kepentingan komunal dan komunitas partai politik. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kewajiban anggota DPRD yaitu: menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pilihannya (*UU No. 17 Tahun 2014*, n.d.) (*Perda Bangkalan No. 34 Tahun 2019*, n.d.)

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi menjadi tanggungjawab politik anggota DPRD kepada konstituen. Konstituen atau Pemilih di daerah pemilihan merupakan pemberi mandat kepada pihak yang harus diberi akuntabilitas, masyarakat yang harus diwakili atau komunitas target yang harus dilayani oleh anggota parlemen (Friedrich Naumann, 2011). Pertanggungjawaban secara moral dengan menindaklanjuti aspirasi masyarakat membuat anggota DPRD memiliki nilai lebih dimata konstituen.

Dengan demikian anggota DPRD berkewajiban membangun komunikasi dengan konstituen di daerah pilihannya. Komunikasi antara anggota DPRD dengan konstituen salah satunya dilakukan melalui reses. Reses merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala yang merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses (Kurniasih dan Rusfiana, 2021).

Bangkalan sebagai salah satu Kabupaten yang berada di pulau Madura pada tahun 2014-2019 juga melaksanakan pemilihan umum legislatif dengan merebutkan 50 kursi DPRD. Angka ini naik 5 kursi dibandingkan pemilu sebelumnya tahun 2009 yang hanya memperebutkan 45 kursi, kenaikan ini berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap Kabupaten Bangkalan yang mengalami kenaikan sampai satu juta pemilih (daerah.sindonews.com, 2021). Komposisi partai politik anggota DPRD Bangkalan Periode 2014-2019 didominasi oleh Partai Gerindra dengan perolehan 10 kursi, disusul oleh PDI-P dengan 7 kursi, Partai Demokrat dan PPP masing-masing 6 kursi, PKB memperoleh 5 kursi, PAN dan Hanura masing-masing 4 kursi, Golkar dan PKS masing-masing 3 kursi.

Sedangkan untuk Dapil I yang meliputi Kecamatan Bangkalan, Arosbaya, dan Socah didominasi oleh Partai Gerindra dengan 3 kursi, dan PDI-P 2 kursi. Partai politik lain hanya mendapat 1 kursi diantaranya PKB, PAN, Demokrat dan Hanura. Melihat perolehan kursi di Dapil III yang meliputi Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang dan Kecamatan Tanjung Bumi perolehan kursi partai politik cukup rata, yakni masing-masing 1 kursi yaitu PKS, PDI P, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura dan PKPI.

Undang-undang Nomor 8 tahun 2012, Pasal 51, mengatur syarat bakal calon anggota DPRD yang salah satunya berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat (*UU No. 8 Tahun 2012*, n.d.). Komposisi anggota DPRD Kabupaten berdasarkan latar Pendidikan berimbang antara yang berlatar belakang pendidikan sekolah menengah atas atau pendidikan lain yang sederajat berjumlah 25 orang, sarjana 21 orang dan magister 4 orang. Di Dapil I dan III latar belakang Pendidikan anggota DPRD didominasi Pendidikan sekolah menengah atas atau pendidikan lain yang sederajat. Dari 9 anggota DPRD dapil I, 4 orang memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan di Dapil III dari 8 orang 3 orang sarjana sedangkan lainnya berlatar belakang Pendidikan sekolah menengah atas atau pendidikan lain yang sederajat

Menurut Steers kemampuan aparatur pemerintah dalam hal ini anggota DPRD dalam berkomunikasi dengan konstituen sebenarnya tidak terlepas dari tingkat kematangan aparatur yang didalamnya menyangkut keterampilan yang diperoleh dari Pendidikan, latihan dan pengalaman (M Rasyid, 1992, p. 107). Ini memiliki asumsi bahwa latar belakang Pendidikan anggota DPRD Kabupaten bangkalan akan berdampak positif terhadap model komunikasi yang digunakan anggota DPRD saat reses sehingga aspirasi masyarakat di dapilnya dapat terserap dengan optimal.

Untuk itu, studi ini fokus membahas pada dua hal utama, pertama, model komunikasi anggota DPRD pada saat reses. Anggota DPRD disini dilihat berdasarkan latar belakang Pendidikannya, tamatan sekolah menengah atas atau pendidikan lain yang sederajat dan sarjana/magister. Kedua, kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD saat melaksanakan kegiatan reses.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

Studi tentang reses oleh anggota DPRD dalam lima tahun terakhir banyak membahas tentang efektivitas pelaksanaan reses, Partisipasi Masyarakat Pada saat Reses, Komunikasi Anggota DPRD saat reses, Hubungan reses dengan penetapan APBD dan Pembangunan daerah. Studi mengenai efektivitas pelaksanaan reses yang dilakukan Apriliansyah yang mengungkapkan bahwa pelaksanaan masa reses anggota DPR RI periode 2014 -2019 yang dilaksanakan Desy Ratnasari sebagai anggota DPR RI > 65% sesuai dengan kriteria yang diharapkan dan sudah efektif (Apriliansyah, 2019). Hal yang sama juga di temukan di pelaksanaan reses anggota DPRD kabupaten Tabanan sudah berjalan baik dan dapat dikatakan efektif (Badrika & Sulandari, 2022). Masyarakat memiliki persepsi yang baik sebesar 87,22% terhadap pelaksanaan reses DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 di Dapil IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan, selain itu masyarakat juga memiliki sikap yang baik sebesar 84,22% dan masyarakat juga menunjukkan partisipasi yang baik pula sebesar 85,56% (Budoyo, 2022).

Akan tetapi studi lain menunjukkan bahwa reses anggota DPRD belum efektif dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dalam studi Wenas dkk mengungkapkan pelaksanaan reses Anggota DPRD Kota Tomohon belum efektif karena belum memprioritaskan kelompok-kelompok yang membutuhkan (Wenas et al., 2021). Pelaksanaan reses Anggota legislatif dalam penanganan permasalahan publik pada Komisi I DPRD Kota Kendari juga belum berjalan optimal, karena anggota DPRD belum melaksanakan fungsi reses dengan baik mulai dari sosialisasi pelaksanaan reses yang tidak optimal, tidak adanya penyampaian materi reses berupa laporan kinerja serta program prioritas pembangunan, serta metode pelaksanaan reses yang tidak partisipatif sehingga menyebabkan minimnya usulan masyarakat yang berkualitas serta mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya (Ismunasari, bahtiar, bake, 2022). Hal ini diperkuat oleh studi lain tentang partisipasi masyarakat pada saat reses dilakukan oleh Thalib dkk mengungkapkan partisipasi masyarakat berupa penyampaian ide yang konstruktif secara umum belum begitu terlihat pada tiga daerah pemilihan anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo (Thalib et al., 2023).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada saat pandemi covid 19 forum reses tidak efektif dijadikan sebagai forum atau sarana untuk menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah (Rusdi, 2022). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan reses oleh anggota DPRA di Dapil 1 wilayah Kota Banda Aceh juga masih rendah, ini ditunjukkan sebesar 79% responden merasa tidak puas terhadap kinerja anggota DPRA dalam penjangkaran aspirasi pada masa reses tahun 2021, masih banyak aspirasi yang dibutuhkan oleh konstituen namun tidak terealisasi (Badzlina et al., 2022).

Studi lain tentang pola komunikasi Anggota DPRD saat reses dilakukan oleh Gulo mengemukakan Pola Komunikasi Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Nias terjadi secara sirkuler. Pola komunikasi sirkuler tergambar dalam penerimaan aspirasi masyarakat kepada Fraksi PDI-P mengenai pembangunan dan kembali disampaikan ke masyarakat dalam bentuk prioritas kebijakan. Mengenai hasil proses formulasi kebijakan tidak semua memprioritaskan

aspirasi, sehingga masyarakat merasa tidak puas. Di lain sisi, koordinasi Fraksi PDI-P dengan ODP untuk terlibat menerima aspirasi secara formal kurang terjalin dengan baik (Gulo et al., 2022).

Studi Yahya dkk menunjukkan komunikasi politik anggota DPRD Kabupaten Sinjai dalam menyerap aspirasi di masa pandemi Covid-19 tetap berjalan sesuai aturan pemerintah dan berada pada protokol kesehatan serta komunikasi yang baik saling menghargai satu sama lain. Proses komunikasi berjalan dengan memperhatikan rasa empati dimiliki oleh anggota DPRD, mampu menyesuaikan situasi masyarakat berdasar budaya serta merasakan kondisi masyarakat. Selain itu juga mendengarkan keluhan masyarakat terhadap kebutuhan dan kesulitan di tengah pandemic Covid-19, dan menjelaskan secara terbuka (Yahya et al., 2022).

Studi Goni dkk menunjukkan penyerapan aspirasi anggota DPRD Kabupaten Minahasa Selatan periode 2014-2019 cukup baik dilihat dari sebagai komunikator dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, misalnya dalam proses pembentukan opini publik untuk membuat beberapa gagasan, yang awalnya ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima, dan untuk mengetahui perkembangan faktual yang terjadi di tengah masyarakat dalam menyusun skala prioritas kegiatan Pembangunan (Goni et al., 2019). Reses DPRD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan di Kota Tebing Tinggi, sebesar 0,200 atau 22,0 %. Pembangunan membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah Kota Tebing Tinggi, masyarakat berpartisipasi aktif dalam pembangunannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kepada berbagai pihak terkait (Hertino et al., 2021).

Berdasarkan hasil studi di atas diketahui bahwa model komunikasi reses yang dilakukan anggota DPRD dalam menyerap aspirasi Masyarakat, dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan anggota DPRD belum ada. Untuk itu studi ini ingin melengkapi studi sebelumnya tentang reses anggota DPRD. Studi ini juga melihat kendala yang dihadapi dalam komunikasi pada saat pelaksanaan reses DPRD Kabupaten Bangkalan di Dapil I dan di Dapil III.

Komunikasi Politik

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff komunikasi politik ialah aktivitas transendental yang melibatkan terjadinya dialog informasi di antara komunal dengan komunitas-komunitasnya pada seluruh tingkat sosial Masyarakat (Rush, Michael dan Althoff, Philip, 2002, p. 23). Sedangkan menurut, Karl W. Deutsch mengartikan bahwa komunikasi politik ialah transmisi informasi yang sesuai dengan politis dari satu segmen sistem politik kepada sistem politik lainnya, dan antara sistem sosial dan sistem politik salah satu unsur dinamis dari suatu sistem politik, sehingga buah yang didapatkan dari impak pada pembahasan suatu kebijaksanaan yang diarahkan untuk kepentingan umum (Cangara, 2002, p. 243). Lord Windlesham mendefinisikan komunikasi politik sebagai penyampaian pesan politik yang membebaskan dari pengirim pesan kepada penerima dengan maksud membuat penerima berperilaku tertentu (Subiakto, Henry dan Rachmah Ida, 2012, p. 20).

Dengan demikian dapat disimpulkan komunikasi politik ialah segala format komunikasi yang berada dalam suatu sistem politik dan antar sistem tersebut dengan lingkungannya, yang memuat jaringan komunikasi (organisasi, komunitas, media massa dan saluran atau frekuensi saluran atau frekuensi spesifik) dan determinan sosial ekonomi dari bentuk-bentuk komunikasi yang ada pada sistem itu. atau dengan kata lain komunikasi politik ialah komunikasi yang melewati pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berhubungan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan program pemerintah.

Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi politik dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, menjaga ketokohan. Ketokohan ialah orang yang mempunyai kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan. Hovland dan Wiss menguraikan bahwa kredibilitas atau ethos itu terdiri dari dua komponen, yakni keahlian (*expertise*) dan kredibilitas (*trustworthiness*) oleh kalangan umum (Rakhmat, 2005, p. 20). Kedua, memantapkan kelembagaan. Selain menjaga ketokohan, prosedur strategis dan pertama yang harus direalisasikan ialah memantapkan kelembagaan atau membesarkan forum dan lembaga.

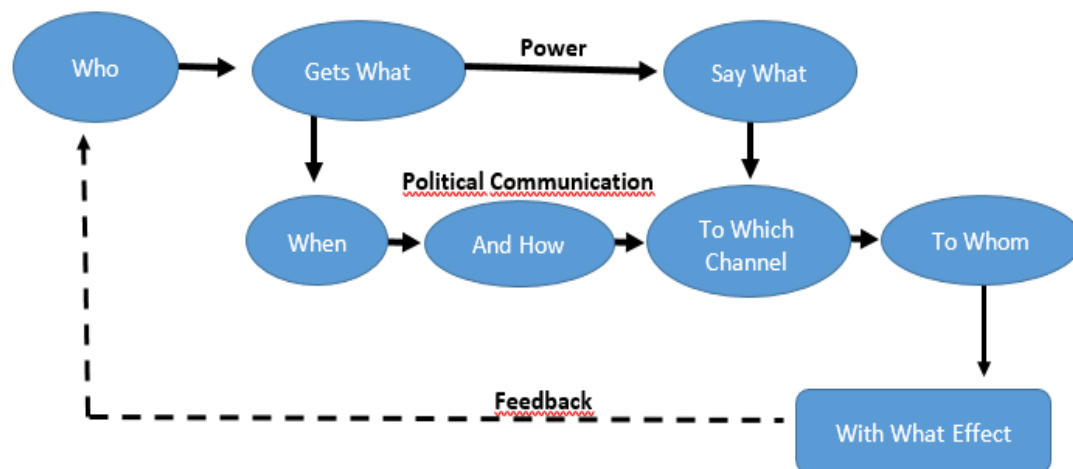
Ketiga, menjadikan kebersamaan. Prosedur strategis kedua yang harus direalisasikan untuk menggapai orientasi komunikasi politik ialah menjadikan kebersamaan antara politikus dan kalangan umum (rakyat) dengan cara mengenal kalangan umum. Keempat. Membangun konsensus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membangun konsensus, yakni seorang komunikator politik harus mempunyai penguasaan dalam hal berkompromi, yang ialah suatu seni tersendiri. Seni atau kita berkompromi itu pada generiknya ialah talenta atau bawaan lahir dan pasti dimiliki oleh seorang komunikator talenta itu harus terus dikembangkan sehingga kemenguasaan membangun konsensus semakin matang. Berikutnya bersedia membuka diri menjadikan suasana yang baik dalam berkomunikasi seorang komunikator politik harus bersedia membuka dirinya dan bertingkah laku sinkron dengan konsep dirinya. Konsep diri yang negatif, selalu berfikir negatif dan peka terhadap kritik, cepat marah atau emosional, bersikap hipokritis dan tendensi merasa tidak disenangi orang lain, serta bersikap pesimistis dan tidak berani bersaing secara sehat sebab selalu merasa tidak percaya diri. Justru itu orang yang mempunyai konsep diri yang negatif dan tidak dapat melahirkan kehangatan serta keakraban dalam pergaulan, sehingga sukar menjadi politikus dan pelobi yang baik.

Model Komunikasi Politik

Komunikasi politik mengalami rangkaian siklus yang dimulai dengan pembicaraan ringan ke sedang sampai krusial (Mirza Shahreza dan Korry El-Yana, 2016, p. 34). Bisa dikatakan bahwa terjadinya pembicaraan ringan ketika ada kesamaan pandangan visi dan misi, sedangkan pembicaraan sedang terjadi ketika ada perbedaan pandangan tetapi masih memiliki satu visi dan misi. Berbeda dengan pembicaraan krusial, pada tahap ini terjadi perbedaan pandangan dan kepentingan yang biasanya diwarnai dengan perdebatan.

Gambar: 1

Model Komunikasi Politik



Gambar: 2
Model Komunikasi Politik

Dari gambar diatas bisa dilihat bagaimana model komunikasi politik dimulai dari siapa yang akan menyampaikan dengan asumsi apa yang ingin dicapai atau didapat sehingga merancang apa yang akan dikatakan. Pada proses penyampaian mempertimbangkan waktu kapan disampaikan, bagaimana cara penyampaian, menggunakan media apa serta kepada siapa targetnya sehingga akan mendapatkan efek apa. Hasil akhir dalam proses komunikasi politik ini adalah mendapatkan timbal balik seperti yang dijelaskan bagan diatas.

Metode

Studi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data, baik secara lisan maupun tulisan, serta juga bisa dari tindakan. Data ini diperoleh dari narasumber dalam hal ini anggota DPRD Kabupaten Bangkalan 2014-2019 yang berlatar belakang Pendidikan sarjana dan bukan sarjana (sekolah menengah atas atau Pendidikan lainnya yang sederajat), tokoh Masyarakat, Tokoh agama dan orang partai dengan total informan berjumlah 10 orang, selanjutnya di deskripsikan serta dijelaskan secara deskriptif. Proses dari penelitian deskriptif dimulai dari rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi situasi social yang di teliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Moleong, 2018).

Studi dilakukan pada reses anggota DPRD Kabupaten Bangkalan 2014-2019, dengan mengambil lokasi Dapil I dan Dapil III. Dapil 1 secara geografis representasi perkotaan meliputi Kecamatan Bangkalan, Arosbaya, dan Socah. Dapil III representasi pedesaan meliputi Kecamatan Kokop, Kecamatan Konang dan Kecamatan Tanjung Bumi. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, dengan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Analisis data dilakukan dengan tahapan: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Bungin, 2007).

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Reses di Daerah Pemilihan

Kegiatan reses merupakan sebuah waktu di mana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPRD (*Perda Bangkalan No. 34 Tahun 2019*, n.d.). Pada masa reses, para anggota dewan ini berkesempatan untuk bertemu dan menjumpai konstituen di daerah pemilihannya (Dapil) masing-masing. Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD. Reses memiliki beragam manfaat untuk DPRD salah satunya melihat kondisi *real* yang ada dimasyarakat secara langsung.

Dalam Peraturan DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, pasal 113 (ayat 1, 3) disebutkan bahwa:

- a. Masa Reses bagi Anggota DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses;
- b. Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - 1) Waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD dan anggota DPRD Kabupaten/kota di Daerah pada daerah pemilihan yang sama;

- 2) Rencana kerja Pemerintah Daerah;
- 3) Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
- 4) Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.

Sedangkan untuk tujuan utama kegiatan reses ialah menyerap aspirasi dari masyarakat, terutama masyarakat yang berada di daerah pemilihan para anggota DPRD. Oleh karena itu, kegiatan reses dipusatkan di daerah pemilihan masing-masing. Reses dilakukan bukan semata-mata untuk menggugurkan kewajiban saja, tetapi ada misi besar. Misi ini adalah menampung aspirasi konstituen untuk disaring dan diajukan ketika masa reses selesai, selain itu reses juga memiliki fungsi untuk menjalin komunikasi yang baik antara aktor politisi dengan konstituen. Reses menjadi agenda formal bertemunya anggota DPRD dengan konstituen, reses dilakukan di masing-masing karena sejatinya mereka dipilih dan terpilih di Dapilnya. Sehingga logikanya reses memberikan ruang secara formal untuk konstituen menyampaikan aspirasinya kepada perwakilannya.

Kegiatan reses yang dilakukan anggota dewan harus mempertimbangkan keterwakilan konstituen. Daerah pemilihan yang terdiri dari beberapa kecamatan harus bisa terakomodir dengan baik, karena sangat tidak mungkin reses dilakukan serentak dalam satu titik sehingga perlu dilakukan di beberapa titik dengan melihat keterwakilan konstituen. Pemilihan titik reses menjadi sangat krusial jika tidak dipertimbangkan dengan baik, mulai dari aspek sosial, kultur dan basisnya. Kegiatan reses di daerah diharapkan memiliki timbal balik, anggota dewan akan memiliki gambaran kondisi masyarakat secara langsung dan mensosialisasikan hal-hal apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini DPRD. Serta bagi masyarakat menjadi suatu sarana bertemu langsung dengan anggota DPRD sehingga bisa menyampaikan secara langsung perihal keluhan dan usulan untuk mengembangkan daerahnya.

Tiga kali dalam satu tahun memberikan ruang tersendiri bagi anggota DPRD untuk bersilaturahmi dengan masyarakat. Momen ini selain menjadi agenda rutin tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial dan politik anggota DPRD

kepada konstituen, mengingat mereka menduduki jabatan itu karena mandat yang diberikan oleh masyarakat di daerah pemilihan.

Keterlibatan beberapa tokoh masyarakat, simpatisan dan masyarakat secara umum dalam kegiatan reses memberikan legitimasi bahwa mereka menjadi komponen penting dalam demokrasi. Secara politis praktis hal ini lebih menguntungkan anggota DPRD, dengan catatan bahwa kegiatan reses dilakukan dengan cara yang benar serta pasca reses, aspirasi masyarakat mendapatkan *follow up* baik di model perencanaan atau diteruskan di dinas-dinas terkait. Bentuk tindak lanjut ini menjadi poin penting pasca kegiatan reses karena akan berdampak kepada kepercayaan publik kepada anggota DPRD. Kepercayaan ini bukan hanya berdampak kepada pemilu yang akan datang tetapi juga berdampak kepada persepsi konstituen terhadap politik.

Format Reses Anggota DPRD

Mekanisme reses yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Bangkalan memiliki cara yang berbeda-beda, meskipun secara keseluruhan model pelaksanaan resesnya hampir sama dengan mengumpulkan konstituen dari perwakilan, tokoh masyarakat, dan simpatisan. Ketika proses akan dilaksanakan reses, mulai dari pengumpulan konstituen dengan memilih dan memilah siapa saja yang akan diundang tidak jarang anggota DPRD akan menggunakan panitia lokal atau simpatisan atau kader yang turut memenangkannya pada waktu pemilihan legislatif. Tetapi tidak menutup kemungkinan anggota DPRD melakukan komunikasi dengan elit lokal untuk menentukan siapa saja yang akan menghadiri acara reses, karena bukan rahasia umum bahwa acara reses menjadi ajang bertemunya konstituen yang loyal kepada anggota legislatif pada saat pemilu legislatif berlangsung.

Format reses yang dilakukan dengan cara mengundang konstituen dalam satu tempat menjadi banyak pilihan yang digunakan para anggota dewan. Pada prosesnya, anggota dewan memiliki metode sendiri-sendiri dalam menyampaikan materi kepada konstituen, ada yang menyiapkan materi secara individu atau kolektif sesama anggota partai yang mendapatkan kursi di DPRD atau secara

sederhana materi disiapkan oleh fraksi. Komunikasi yang dilakukan anggota DPRD dan konstituennya pada saat reses idealnya menggunakan komunikasi dua arah sehingga terdapat timbal balik yang positif pada saat reses (Palulungan dkk, 2018). Tetapi tidak jarang pada saat reses sudah dilakukan seting acara sehingga kegiatan reses seolah-olah akan berjalan secara baik. Seting acara disini bukan hanya tentang susunan acara tetapi juga dikonsep siapa saja yang akan bertanya memberikan usulan sampai aspirasi apa yang akan disampaikan.

Format reses jika ditinjau dari wilayahnya, antara wilayah kota dengan wilayah desa tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan. Dalam hal ini jika ditinjau dari segi wilayah, maka asumsinya reses yang dilakukan di kota akan menjadi lebih menarik karena konstituen akan lebih aktif. Meskipun dalam kenyataannya format di desa tidak kalah menarik karena banyak masyarakat desa yang memiliki aspirasi dan masukan kepada anggota DPRD. Sehingga format reses baik di kota dengan di desa tidak ada yang berbeda dalam hal substansi.

Format reses besar kemungkinan tidak berbeda, yang mungkin menjadi perhatian adalah kebudayaan yang muncul diluar reses. Bentuk kebudayaan disini adalah ketika selesai reses, anggota DPRD tidak bisa langsung meninggalkan tempat acara karena harus bertemu dengan masyarakat atau bisa dikatakan sebagai bentuk basa-basi politik menyapa di luar forum. Meskipun demikian banyak anggota masyarakat yang merasa lebih nyaman dan leluasa berbicara ketika acara reses selesai diselenggarakan.

Model Komunikasi Reses anggota DPRD Berlatar Belakang Pendidikan Sarjana dan Bukan Sarjana

Model komunikasi politik terbagi menjadi 4 dimensi waktu yaitu sebelum pemilu, pada masa menjalankan kekuasaan atau menjabat, pada masa mempertahankan kekuasaan dan pada saat diluar pemerintahan (Mirza Shahreza dan Korry El-Yana, 2016, p. 34). Sehingga bisa dikatakan ketika aktor politik sudah terpilih pada kasus ini menggunakan dimensi kedua dan ketiga dalam komunikasi politik, yakni pada masa menjalankan kekuasaan atau pada waktu terpilih dan pada saat mempertahankan kekuasaan. Hal ini bisa terjadi karena para aktor politik

sudah menduduki jabatan anggota legislatif di Kabupaten Bangkalan sehingga untuk merawat konstituen dibutuhkan formulasi komunikasi politik yang tepat.

Secara garis besar terdapat beberapa bentuk komunikasi politik, baik yang dilakukan secara formal maupun yang dilakukan secara informal. Penggunaan komunikasi politik tergantung dari sifat dan kebutuhan dari apa yang ingin didapat. Komunikasi yang dilakukan anggota DPRD Bangkalan kepada para konstituennya dengan menggunakan sarana reses. Reses yang dilakukan beberapa kali dalam satu tahun adalah salah satu upaya menjalin komunikasi. Model komunikasi dua arah menjadi formula untuk menampung aspirasi masyarakat meskipun idealnya bisa menyerap seluruh aspirasi masyarakat tetapi pada praktiknya hanya bisa menampung beberapa saja. Seperti yang dikatakan oleh Agus selaku anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dari Dapil III yang menyatakan bahwa pada waktu reses selain menjelaskan program apa saja yang sudah dikerjakan kepada konstituen, masyarakat diminta untuk memberikan masukan untuk ditampung dan ditindaklanjuti (Kurniawan, *Wawancara*, 25 Juni 2021). Hal senada juga dikatakan oleh Sahrudin yang menyatakan bahwa reses berfungsi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat secara langsung, sehingga bisa mengusulkan secara langsung kepada pemerintah meskipun tidak seluruh tuntutan atau aspirasi masyarakat akan terealisasi karena menyesuaikan dengan anggaran yang ada (Dahriyadi, *Wawancara*, 18 Juni 2021).

Penyerapan aspirasi secara langsung yang dikerjakan pada waktu reses anggota DPRD menjadi salah satu model komunikasi yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD tanpa melihat latar belakang pendidikan yang melekat pada anggota DPRD. Model komunikasi yang dilakukan hampir sama antara satu anggota DPRD Bangkalan dengan anggota DPRD lainnya hanya saja beda dalam implementasi dilapangnya. Selain menggunakan reses sebagai sarana menyerap aspirasi masyarakat, beberapa anggota DPRD Kabupaten Bangkalan memiliki trik lain untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan pendekatan persuasif. Sahrudin mengungkapkan untuk lebih dekat dengan para konstituen menggunakan cara berjamaah sholat dari satu masjid ke masjid sehingga langsung bersentuhan dengan masyarakat dan mendapatkan masukan meskipun pada akhirnya diundang pada

waktu reses untuk kegiatan yang lebih formal (Dahriyadi, *Wawancara*, 18 Juni 2021).

Selain menggunakan masjid sebagai media bertemu dengan masyarakat, Sahrudin ikut aktif dalam pekerjaan sosial seperti takziah dan menyediakan mobil untuk kepentingan darurat secara gratis dan suka rela. Pendekatan yang dilakukan oleh Dahriyadi bisa dikatakan sebagai upaya untuk merawat konstituen dengan bentuk komunikasi politik. Komunikasi politik yang dilakukan Dahriyadi terbukti memberikan efek yang cukup baik karena dapat menjabat DPRD Bangkalan secara dua periode berturut-turut mulai dari periode 2009-2014 dan 2014-2019.

Hal ini sesuai dengan teori model komunikasi politik yang melihat sasaran pada umumnya, memiliki target orientasi yang berdasarkan waktu dan cara serta penggunaan medium apa untuk menyampaikan informasi sehingga akan mendapatkan efek timbal balik dari para konstituen atau Masyarakat (Mirza Shahreza dan Korry El-Yana, 2016, p. 35). Pemilihan sasaran atau target apa yang menjadi tujuan awal komunikasi politik harus menjadi landasan utama, karena tidak bisa dipungkiri hal ini akan berdampak kepada penggunaan media saluran yang akan digunakan. Seperti yang dilakukan oleh Dahriyadi yang memiliki orientasi sasaran masyarakat yang banyak berkecimpung dalam hal peribadatan sehingga beliau menggunakan pendekatan sholat berjamaah berpindah-pindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Penggunaan media sholat jamaah dari satu masjid ke masjid yang lain memiliki tujuan utama untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung dan terbukti masyarakat juga memberikan timbal balik, sehingga secara tidak langsung yang dilakukan Dahriyadi sesuai dengan teori model komunikasi politik dengan melihat target oriented.

Berbeda dengan Dahriyadi yang mencoba turun langsung ke lapangan, Agus Kurniawan memiliki strategi yang sedikit berbeda untuk menjalin komunikasi politik kepada para konstituennya. Agus Kurniawan menjabarkan karena keterbatasan waktu untuk turun langsung ke lapangan maka diperlukan media sebagai untuk menghubungkannya dengan para konstituen yaitu dengan menggunakan telepon (Kurniawan, *Wawancara*, 18 Juni 2021). Pemilihan sarana

telekomunikasi yang dipilih Agus merupakan sebuah upaya untuk membangun komunikasi politik yang baik dengan konstituennya, hal ini wajar terjadi karena jika hanya mengandalkan pertemuan resmi atau reses, bisa dikatakan hasilnya akan kurang maksimal. Pemilihan media telekomunikasi dalam hal ini telepon memberikan keleluasaan kepada konstituennya untuk menyampaikan pendapat secara langsung.

Sama halnya dengan Dahriyadi, Mahmudi selaku anggota DPRD Kabupaten Bangkalan periode 2014-2019 juga memiliki strategi komunikasi politik kepada konstituen. Mahmudi mengungkapkan:

“Ya pertama anggota DPRD jangan menonjolkan DPRD-nya, maksudnya jangan mentang-mentang anggota DPRD maka harus formal, harus dihormati, dan lain sebagainya. Kita harus sadar bahwa kita ini wakil rakyat, harus berbaur ke masyarakat. Kita yang membuka komunikasi dan menyapa duluan ke masyarakat, di acara tahlilan, masjid, dan lain sebagainya. Insya Allah masyarakat akan terbuka ke kita, serta mereka akan nyaman komunikasi dengan kita (Mahmudi, *Wawancara*, 18 Juni 2021)”

Sehingga bisa ditarik sebuah benang merahnya tentang bentuk komunikasi yang dilakukan oleh ketiga anggota DPRD Kabupaten Bangkalan antara Agus, Dahriyadi dan Mahmudi meskipun dengan metode yang berbeda, tetapi memiliki implikasi yang sama kepada konstituen. Berbeda dengan mereka bertiga, Mohamad Sunar sebagai salah satu tokoh masyarakat di Dapil III Kabupaten Bangkalan mengatakan bahwa reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Bangkalan hanya bersifat formalitas (Sunar, *Wawancara*, 11 Juni 2021). Formalitas yang dimaksud oleh Sunar sebagai bentuk menggugurkan kewajiban dari anggota dewan karena pada pertemuan reses yang dilakukan sudah disetting sedemikian rupa yang mengakibatkan bukan murni dari pendapat masyarakat.

Tabel 1. Temuan Model Komunikasi

Kategori	Model Komunikasi Anggota DPRD berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	
	Sarjana	Bukan Sarjana
Format reses	Dialog dua arah	Dialog dua arah
Persepsi atas reses	Reses dianggap forum penting untuk menyerap	Reses dianggap forum penting untuk menyerap

	aspirasi konstituen di Dapil masing-masing	aspirasi konstituen di Dapil masing-masing
Tindak lanjut pasca reses	Aspirasi dari konstituen diteruskan dengan mitra kerja dewan, OPD	Aspirasi dari konstituen diteruskan dengan mitra kerja dewan, OPD
Forum aspirasi di luar Reses	Pemanfaatan telepon, dan media sosial	Safari politik dengan cara solat berjamaah di masjid dan musholla

Sumber: Diolah dari data penelitian

Jika dilihat dari tabel diatas maka bisa dilihat bahwa format reses yang dilakukan antara DPRD yang berpendidikan sarjana dengan non sarjana cenderung sama karena menggunakan dialog dua arah. Menurut kedua kelompok tersebut reses memiliki makna sebagai ajang untuk menyerap aspirasi dari konstituennya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen, anggota dewan meneruskan hasil reses kepada mitra kerja dan organisasi perangkat daerah atau OPD.

Selain itu, dari tabel diatas terdapat model komunikasi diluar waktu reses yang digunakan oleh anggota dewan baik menggunakan media sosial dan safari politik. jika ditelisik lebih dalam safari politik memiliki dampak yang cukup besar daripada penggunaan media sosial atau telepon karena melihat kultur dari masyarakat yang merasa lebih dekat dengan anggota dewan ketika dewan langsung bertegur sapa di luar kegiatan formal. Kunjungan non formal dengan mengunjungi dari satu masjid ke masjid yang lain lebih mendapatkan respon positif dari masyarakat berupa komunikasi politik dua arah atau konstituen lebih leluasa menyampaikan keluhan kesah dan aspirasinya. Selain itu tidak semua lapisan konstituen mampu menggunakan sarana media sosial sehingga sedikit banyak kurang efektif penggunaan media sosial dibandingkan dengan safari politik secara langsung.

Temuan penting di lapangan menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan model komunikasi antara DPRD Bangkalan yang berlatarbelakang sarjana maupun yang bukan sarjana di Dapil I yang basis perkotaan maupun Dapil III yang basis pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan tidak sepenuhnya mempengaruhi terhadap pola maupun model komunikasi saat reses, justru yang

memberikan pengaruh ialah pengalaman para anggota DPRD sendiri. **Tabel 2. Reses Berdasarkan Geografis Kota dan Pedesaan**

Kriteria	Komunikasi Reses berdasarkan Geografis	
	Dapil I (Kota)	Dapil III (Pedesaan)
Format Reses	Dialog dua arah	Dialog dua arah
Partisipasi masyarakat Perempuan dalam Reses	Perempuan sedikit banyak menyampaikan aspirasi saat kegiatan reses dilakukan	Perempuan menitipkan aspirasinya kepada kaum laki-laki atau orang yang vokal dalam berbicara secara garis besar perempuan pasif ketika reses
Melibatkan Tokoh Masyarakat dalam Reses	Iya	Iya
Melibatkan kelompok anak muda dalam	Iya	Iya
Forum	Formal dan tidak formal	Formal dan tidak formal

Sumber: Diolah dari data penelitian

Secara garis besar reses yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan antara di Dapil I yang notabennya adalah perkotaan dan Dapil III yang notabennya adalah pedesaan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini bisa terjadi karena secara kultur dan politik masih dalam satu wilayah sehingga ketika reses baik para aktor politik dan konstituen memiliki kecenderungan yang sama. Perbedaan hanya terletak pada partisipasi perempuan, Dapil I partisipasi perempuan sedikit terasa dengan ikutnya beberapa perempuan yang menyampaikan aspirasi sedangkan di Dapil III, para konstituen perempuan cenderung pasif dengan menitipkan aspirasinya kepada laki-laki.

Kendala Komunikasi yang Dihadapi

Komunikasi politik yang berjalan baik tidak serta merta dalam prosesnya berjalan tanpa kendala. Terdapat permasalahan terhadap pemahaman masyarakat ketika anggota legislatif memberikan penjelasan, hal ini terjadi karena sumber daya manusia yang masih minim, pungkas Agus (Kurniawan, *Wawancara*, 18 Juni 2021).

Selain itu, keterwakilan perempuan dalam menyampaikan aspirasinya masih kurang. Seperti yang diungkapkan Sahrun, perempuan tidak pernah mengungkapkan aspirasi pada saat reses berlangsung (Sahrun, *Wawancara*, 18 Juni 2021). Kurangnya atau minimnya perempuan menyampaikan aspirasi membuat hasil reses hanya berfokus kepada kepentingan-kepentingan umum.

Pengaruh pendidikan di klaim menjadi kendala, masih ada masyarakat yang malu dalam menyampaikan aspirasi. Seperti beberapa konstituen yang hadir dalam resesnya Agus, yang mengalami kesulitan menyampaikan aspirasi dengan tepat meskipun Agus mengerti arah dan tujuan pembicaraan yang disampaikan oleh konstituen. Hal ini dibenarkan oleh Ilyas, adanya kendala dalam menyampaikan aspirasi yang dialami oleh masyarakat terjadi karena kurang terbiasanya masyarakat berbicara didepan umum. Sehingga bisa ditarik benang merahnya kendala yang dialami oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasi lebih disebabkan oleh keadaan masyarakat sendiri meskipun anggota dewan baik Agus dan Sahrun menyikapinya dengan biasa karena mereka sudah mengerti arah dan tujuan yang disampaikan oleh masyarakat.

Kendala komunikasi politik yang terjadi antara anggota dewan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil III dengan para konstituennya lebih kepada konstituen yang kurang maksimal dalam menyampaikan aspirasi. Yang dimaksud kurang maksimal disini adalah hanya beberapa konstituen yang menyampaikan aspirasinya karena memang dari awal sudah vokal dalam menyuarakan pendapat, berbeda dengan kebanyakan masyarakat yang masih malu dalam menyampaikan pendapat sehingga menitipkan aspirasinya kepada yang vokal. Kebanyakan masyarakat menitipkan aspirasinya kepada yang biasa vokal dalam menyuarakan pendapat, seperti yang dikatakan Moh Ilyas selaku salah satu tokoh masyarakat di Dapil III Bangkalan.

Aliman memberikan catatan tersendiri terhadap kendala komunikasi politik yang terjadi antara Anggota DPRD Bangkalan dengan konstituen yang merujuk kepada personal Anggota Sendiri, mengingat bahwa banyak anggota DPRD Bangkalan yang baru sehingga masih minim memahami tupoksinya:

“Kalau saya melihat, mayoritas anggota DPRD Bangkalan itu baru, banyak anggota yang secara tupoksi masih belum fasih dan untuk mengurasi persoalan yang ada membutuhkan waktu yang cukup lama, karena masih banyak belajar. Mayoritas DPRD itu masih banyak hal yang harus perbaiki karena masih jauh dari harapan konstituen (Harish, *Wawancara*, 18 Juni 2021).”

Dari pernyataan diatas bisa dilihat bahwa faktor personal anggota DPRD Bangkalan juga menjadi kendala tersendiri dari masih lemahnya komunikasi politik yang terjalin dengan konstituen. Jarak antara anggota DPRD dengan konstituen juga bisa mengindikasikan kurang terbukanya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, sehingga diperlukannya langkah yang lebih kongkrit untuk menjembatani masyarakat dengan anggota DPRD agar problem komunikasi dapat teratasi. Jika melihat kendala yang ada maka bisa ditarik sebuah proposisi bahwa intensitas hubungan komunikasi yang terjadi belum sepenuhnya terbuka, terbukti bahwa ada beberapa konstituen yang belum maksimal dalam menyampaikan aspirasinya yang berakibat hanya beberapa masyarakat yang berani secara langsung menyampaikan aspirasinya karena memiliki latar belakang vokal dalam menyampaikan pendapat.

Selain alasan diatas, menurut Sunar selaku salah satu konstituen di Dapil III mengatakan bahwa masyarakat enggan menyampaikan aspirasinya karena beberapa kali masyarakat sudah mengutarakan aspirasinya tetapi tidak kunjung terealisasi (Sunar, *Wawancara*, 11 Juni 2021). Sehingga berakibat masyarakat merasa bahwa yang mereka usulkan hanya sebatas angin lalu belaka. Krisis kepercayaan menjadi problem selanjutnya dalam komunikasi politik antara anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil III dengan konstituennya. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut yang dilakukan anggota DPRD kepada para konstituennya untuk meminimalisir kekecewaan yang akan terjadi karena adanya salah persepsi ketika ada aspirasi yang masuk akan selalu memiliki *follow up* yang instan, agar masyarakat tidak merasa tertipu atau menganggap reses sebagai sebuah kegiatan formalitas belaka.

Sama halnya dengan kondisi di Dapil I Bangkalan yang diungkapkan oleh Mujiyati bahwa ada beberapa masyarakat yang sebenarnya memiliki informasi tetapi lebih memilih diam ketika reses dilakukan (Mujiyati, *Wawancara*, 2 Juli 2021).

Kendala komunikasi lebih berasal dari kalangan konstituen yang belum bisa dengan leluasa mengeluarkan pendapatnya. Hal ini bisa terjadi karena kurang adanya kedekatan emosional yang terjalin antara anggota DPRD dengan konstituen. Sehingga mengindikasikan masih minimnya interaksi yang dilakukan kedua belah pihak, bisa juga komunikasi politik yang dilakukan hanya terjadi pada saat reses saja.

Selain itu masalah komunikasi politik yang terjadi di Dapil I antara konstituen dan anggota DPRD terjadi karena adanya traumatik politik (Mutmainah, *Wawancara*, 28 Juni 2021). Traumatik politik ini merujuk kepada krisis kepercayaan masyarakat kepada anggota DPRD ketika reses, karena masyarakat menganggap bahwa ketika reses selesai dilakukan tidak ada kelanjutan. Sehingga masyarakat merasa bahwa percuma melakukan reses karena tidak ada hal yang berubah. Traumatik politik ini sebenarnya bisa diselesaikan atau disembuhkan dengan cara anggota DPRD terus mengawal aspirasi masyarakat pasca reses. pasca reses seharusnya anggota DPRD memilah dan membuat prioritas aspirasi yang masuk serta memetakan untuk dikerjakan lebih dahulu dan tetap mengawal secara berkala.

Dari penjabaran diatas bisa dibedakan problem yang terjadi di Dapil I dan Dapil III. Meskipun secara garis besar terdapat permasalahan yang hampir mirip seperti sumber daya manusia dan kurang percaya dirinya beberapa konstituen untuk menyampaikan aspirasi pada waktu reses. Partisipasi perempuan untuk menyampaikan aspirasi pada waktu reses juga menjadi temuan, dimana di Dapil III kebanyakan perempuan menitipkan aspirasinya, sedangkan di Dapil I lebih terasa partisipasinya. Sehingga bisa ditarik benang merahnya bahwa permasalahan yang terjadi ketika waktu reses bisa dikatakan masih ada jarak antara anggota parlemen dengan masyarakat yang berimbas kurang terjadi komunikasi politik yang maksimal. Perlu adanya pendekatan yang lebih persuasif yang dilakukan oleh anggota parlemen sehingga ketika reses dilakukan masyarakat tidak akan sungkan mengutarakan pendapatnya.

Tabel 3. Perbandingan Kendala Reses

	Dapil I	Dapil III
Partisipasi Perempuan	Perempuan berpartisipasi pada saat reses dengan menyatakan aspirasinya secara langsung, meskipun demikian masih belum banyak perempuan yang vokal bersuara di Dapil ini	Perempuan berpartisipasi pada saat reses namun tidak menyampaikan aspirasi secara langsung di forum, karena banyak yang menitipkan aspirasinya kepada laki-laki atau suaminya atau orang yang dianggap bisa dipercaya
Partisipasi Masyarakat Secara Umum	Kurang terbiasanya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi	Kurang terbiasanya masyarakat dalam menyampaikan aspirasi
Kurang percaya antara konstituen dengan anggota DPRD	<i>Follow Up</i> dari kegiatan reses yang tidak terlaksana menimbulkan rasa tidak percaya konstituen kepada anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di khususnya di Dapil I	<i>Follow Up</i> dari kegiatan reses yang tidak terlaksana menimbulkan rasa tidak percaya konstituen kepada anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di khususnya di Dapil III

Sumber: Diolah dari data penelitian

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan reses ialah partisipasi kelompok perempuan yang tidak merata. Misalnya berkaitan dengan partisipasi kelompok perempuan, baik yang di Dapil I maupun Dapil III secara umum masih kurang maksimal partisipasinya. Di sisi lain, terkadang perempuan menitipkan apa yang disampaikan saat reses kepada kaum laki-laki. Meskipun secara umum tidak ada kendala berarti dalam proses komunikasi yang dilakukan oleh anggota DPRD yang berlatarbelakang sarjana maupun bukan sarjana.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dapat diambil kesimpulan pertama, model komunikasi yang dihasilkan oleh anggota DPRD yang berpendidikan sarjana dengan anggota DPRD yang bukan sarjana tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal reses. Model komunikasi politik cenderung dua arah pada waktu reses. Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Dapil I yang merepresentasikan daerah perkotaan, dalam

melakukan komunikasi politik cenderung terbuka dan terjadi komunikasi dua arah. Hal ini juga terjadi di Dapil III Kabupaten Bangkalan, ketika Anggota DPRD melakukan reses juga terjadi komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah ini mengindikasikan bahwa antara anggota DPRD dengan konstituen terdapat ikatan emosional karena tidak dipungkiri bahwa menyampaikan aspirasi di dalam forum reses membutuhkan keberanian. Konstituen menyadari bahwa reses sebagai momen formal bertemunya anggota dewan untuk menjaring aspirasi. Begitu juga dengan DPRD mengartikan reses sebagai sebuah momen untuk menjaring aspirasi rakyat secara langsung dan mengetahui apa saja kendala atau masalah yang dihadapi masyarakat.

Kedua, kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada saat reses. Kendala yang dihadapi anggota DPRD baik di Dapil I dan Dapil III adalah minimnya perempuan menyampaikan aspirasi pada saat reses, terlebih di Dapil III. Perempuan kurang mendapatkan porsi, dimana mayoritas aspirasi disampaikan oleh laki-laki. Selain itu terdapat beberapa masyarakat yang masih malu untuk menyampaikan pendapatnya ketika reses dilakukan. Kurang percaya dirinya masyarakat menyampaikan aspirasi mengindikasikan bahwa masih harus ada pendekatan yang lebih persuasif baik di acara formal maupun acara non formal.

Secara garis besar bisa dikatakan bahwa penelitian ini menghasilkan gaya komunikasi politik antara anggota DPRD yang berpendidikan sarjana dan non sarjana di Dapil I dan Dapil III Kabupaten Bangkalan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan dan cenderung memiliki kesamaan.

Referensi

- Apriliansyah, M. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Masa Reses Anggota DPR RI Periode 2014-2019 di Daerah Pemilihan Jabar IV. *Jurnal Serasi*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.36080/js.v17i1.801>
- Badrika, I. N. A., & Sulandari, S. (2022). Efektivitas Program Reses DPRD Kota Medan Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Medan Labuhan. *Jurnal Widya Publika*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v10i2.929>

Badzlina, D., Hasan, E., & Ahmady, I. (2022). *Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Reses Anggota DPRD Tahun 2021 Di Dapil 1 Wilayah Kota Banda Aceh* (1). 3(1), Article 1.

Budoyo, G. (2022). Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Reses DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 di Dapil IX Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.37504/map.v5i3.432>

Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.

Cangara, H. (2002). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Press.

Friedrich Naumann. (2011). *Konstituen, pilar utama partai politik: Modul pendidikan politik : manajemen konstituen*. Stiftung fuer die Freiheit.

Goni, M. G. H., Nayoan, H., & Liando, D. (2019). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota DPRD Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019. *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3), Article 3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/26667>

Gulo, D. J., Simamora, P. R. T., & Sukatendel, R. (2022). Pola Komunikasi Politik Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat. *JURNAL SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2), Article 2.

Hertino, D., Hutagalung, G., Nainggolan, P., & Situmeang, R. (2021). Pengaruh Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pembangunan Di Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Regional Planning*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.36985/jrp.v3i2.629>

Ismunasari, bahtiar, bake. (2022). *Efektifitas Pelaksanaan Reses Anggota Legislatif Dalam Penanganan Permasalahan Publik (Studi Kasus Komisi I DPRD Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara)*. <https://journal.uho.ac.id/index.php/publica/article/view/198>

Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). FUNGSI RESES ANGGOTA DPRD DALAM MENGARTIKULASIKAN ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Academia Praja*, 4(2), Article 2.

M Rasyid. (1992). *Pembangunan Kualitas dan Usaha Usaha Peningkatan Aparatur Pemerintah*. Universitas Tadulako.

Mirza Shahreza dan Korry El-Yana. (2016). *Etika Komunikasi Politik*. Indigo Media.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>

Palulungan dkk, L. (2018). *Panduan Reses Partisipatif*. Yayasan Bakti.

Perda Bangkalan No. 34 Tahun 2019. (n.d.). Retrieved October 31, 2023, from <https://jdihn.go.id/files/1023/19perdprdbangkalankab034.pdf>

Rakhmat, J. (2005). *Metode penelitian Komunikasi*. PT. Remaja Rosda Karya.

Rusdi, M. (2022). *Hak Konstitusional Masyarakat Dalam Berpartisipasi Pada Pembentukan Peraturan Daerah Melalui Forum Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Masa Pandemi Covid-19*. <https://jhlp.org/index.php/JHLP/article/view/7>

Rush, Michael dan Althoff, Philip. (2002). *Pengantar Sosiologi Politik*. Rajawali Press.

Subiakto, Henry dan Rachmah Ida. (2012). *Komunikasi Politik, Media, dan Demokrasi*. Kencana.

UU No. 8 Tahun 2012. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved November 1, 2023, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37659/uu-no-8-tahun-2012>

UU No. 17 Tahun 2014. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved October 28, 2023, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>

Wenas, E. S., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota DPRD Kota Tomohon. *GOVERNANCE*, 1(2), Article 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/36324>

Yahya, M., Rezkiawan, A., & Rina, D. (2022). Komunikasi Politik Anggota Dprd Kabupaten Sinjai Dalam Menyerap Aspirasi Rakyat Di Masa Pandemi Covid-19. *PILAR*, 13(2), Article 2.

Wawancara

Mohammad Sunar, S.Pd (Tokoh Masyarakat), *Wawancara, Jum'at, 11 Juni 2021*

KH. Moch. Ilyas (Tokoh Agama dan Anggota DPRD Bangkalan dari partai PKB 2004-2014), *Wawancara, Jum'at, 11 Juni 2021*

Matur Khusairi, S.Ag (anggota Partai PPB dan Ketua PAC Partai Bulan Bintang Bangkalan 2016-2020), *Wawancara, Jum'at, 11 Juni 2021*

Dr. Mutmainah. M. Si. M. Pdi (Tokoh Perempuan), *Wawancara, Jum'at, 11 Juni 2021*

Aliman Harish, S.Pd (pengamat Politik), *Wawancara, Jum'at, 30 Juli 2021*

M Sahrum Dahriyadi, Anggota DPRD Dapil 3 dari partai Hanura, *Wawancara Jum'at, 18 Juni 2021*

Mahmudi, Anggota DPRD Dapil 1 dari partai Hanura, *Wawancara Senin, 21 Juni 2021*

Agus Kurniawan, SE, Anggota DPRD Dapil 3 dari partai Hanura, *Wawancara, Jum'at, 25 Juni 2021*

Dr. Mutmainah. M. Si. M. Pdi, Tokoh Perempuan, *Wawancara Senin, 28 Juni 2021*

Mujiyati, Pendamping PKH, *Wawancara Jum'at, 2 Juli 2021*

Mohammad Rusdi, simpatisan partai demokrat dan sering terlibat di reses, *wawancara Senin, 5 Juli 2021*